

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 1



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Solopos
Media Online

Wilayah: Kabupaten Klaten

Halaman 15

Setahun, Kejar PAD Rp249 Miliar

TAUFIQ SIDIK PRAKOSO

KLATEN—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2021 senilai Rp249 miliar. Guna mengejar target tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berharap kondisi perekonomian berangsur pulih pada tahun ini.

Target tersebut bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Target terbesar dari pajak daerah senilai Rp103 miliar.

Kabid PAD BPKD Klaten, Riyan Wijaya, mengakui cukup sulit untuk mencapai target PAD pada tahun ini lantaran di tengah kondisi pandemi Covid-19. Berpijak pada pengalaman sepanjang 2020 yang juga masih berada pada masa pandemi, PAD Klaten turun drastis.

"PAD pada 2020 turun hampir 21% dari target awal," kata Riyan saat ditemui *Espos* di ruang kerjanya, Kamis (25/2/2021).

Menurunnya PAD terjadi pada berbagai sektor pendapatan. Dia mencontohkan pajak daerah pada sektor pajak hotel dan restoran. "Semuanya terpukul. Tetapi kalau bisa dikatakan yang paling terpukul itu pajak hotel dan restoran. Sifatnya kan *self assesment*. Kalau tidak ada tamu ya tidak ada pendapatan masuk," urai dia.

Soal upaya mengejar target PAD 2021, Riyan menjelaskan sulit dilakukan ketika dalam kondisi pandemi Covid-19 di mana kasus penularan virus *corona* masih tinggi. Satu-satunya harapan adalah kasus Covid-19 bisa segera mereda dan terkendali agar berbagai sektor, termasuk ekonomi berangsur pulih. Vaksinasi yang kini masih bergulir digadang-gadang bisa memulihkan keadaan. "Harapan dan doa kami itu virus *corona* bisa berlalu melalui vaksinasi," kata dia.

Mengenai keringanan bagi para wajib pajak, Riyan menuturkan sudah diberlakukan sejak 2020. Keringanan itu seperti membebaskan denda bagi wajib pajak yang membayar PBB melebihi jatuh tempo saban September. Pembebasan denda direncanakan kembali bergulir pada tahun ini.

Ditanya pembebasan pembayaran pajak, Riyan mengatakan sulit dilakukan. Pemerintah membutuhkan pendapatan untuk bergulirnya pembangunan, termasuk menyokong kebutuhan anggaran penanganan dampak Covid-19.

Riyan berharap seluruh pihak memaklumi kondisi tersebut lantaran terjadi secara nasional sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Dia juga berharap berbagai pihak ikut mendukung upaya penanganan Covid-19 dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan agar kondisi ekonomi cepat pulih.

